

**ANALISIS KEBIJAKAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DI SD
NEGERI 028 PEMATANG REBA, RENGAT BARAT INDRAGIRI HULU
(Studi tentang Kebijakan Kepmendikbudristek No.56/M/2022 tentang
Pedoman Penerapan Kurikulum Merdeka)**

CITRA AYU¹

¹Program Pasca Sarjana Administrasi Pendidikan Universitas Riau

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan yang mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka di SD Negeri 028 Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu berdasarkan Kepmendikbudristek No.56/M/2022. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penentuan subyek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan hasil penelitian maka dilakukan teknik pemeriksaan data berdasarkan empat kriteria yaitu Derajat Kepercayaan (*Credibility*), Transferabilitas (*Transferability*), Kebergantungan (*Dependability*), dan Kepastian (*Confirmability*). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: Proses Komunikasi Kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka di SD Negeri 028 Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu sudah dilakukan melalui sosialisasi dalam bentuk pelatihan, diklat, dan workshop. Namun volume atau porsi pelatihan harus lebih ditingkatkan. Kejelasan informasi tentang kebijakan Kurikulum Merdeka harus disampaikan ke sasaran. Sosialisasi kurikulum Merdeka harus secara rutin dilaksanakan karena masih rendahnya pemahaman guru dan warga tentang Kurikulum Merdeka; Kesiapan Sumber daya dalam implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka di SD Negeri 028 Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu cukup memadai; pemahaman mengenai capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, modul ajar dan proyek penguatan profil pelajar pancasila, perlu ditingkatkan lagi melalui pelatihan; implementasi kebijakan kurikulum merdeka di SD Negeri 028 Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu, sudah berjalan baik dalam hal koordinasi internal pelaksanaan kebijakan.

Kata Kunci: Kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka

Abstract

This study aims to describe the implementation of policies that describe the implementation of the Independent Curriculum policy at SD Negeri 028 Pematang Reba, West Rengat, Indragiri Hulu based on Kepmendikbudristek No.56/M/2022. This type of research is qualitative research. Determination of research subjects is done using purposive techniques. Sources of data used in this study are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. To test the validity of the research results, a data examination technique was carried out based on four criteria, namely the Degree of Trust (Credibility), Transferability (Transferability), Dependence (Dependability), and Certainty (Confirmability). Based on the results of the study, it shows that: The Communication Process for the Implementation of the Independent Curriculum Policy at SD Negeri 028 Pematang Reba, West Rengat, Indragiri Hulu has been carried out through socialization in the form of training, training, and workshops. However, the volume or portion of the training should be increased. Clarity of information about the Independent Curriculum policy must be conveyed to the target. Socialization of the Merdeka curriculum must be carried out routinely because of the low understanding of teachers and residents about the Independent Curriculum; The readiness of resources in implementing the Independent Curriculum policy at SD Negeri 028 Pematang Reba, West Rengat, Indragiri Hulu is quite adequate; understanding of learning outcomes, learning objectives, teaching modules and projects to strengthen the profile of Pancasila students, need to be further improved through training or training for teachers; the bureaucratic structure in implementing the independent curriculum policy at SD Negeri 028 Pematang Reba, West Rengat, Indragiri Hulu, has gone well in terms of internal coordination of policy implementation. **Keywords:** Independent Curriculum Implementation Policy.

I. PENDAHULUAN

Dalam perjalanan sejarah kurikulum di Indonesia, kurikulum nasional telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Kurikulum sangat dibutuhkan sebagai pedoman untuk menyusun target dalam proses belajar mengajar. Karena dengan adanya kurikulum maka akan memudahkan setiap pengajar dalam proses belajar mengajar.

Pengembangan kurikulum merupakan sesuatu hal yang dapat terjadi kapan saja sesuai dengan kebutuhan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hal-hal yang harus segera ditanggapi dan dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pada setiap jenjang pendidikan. Kondisi masa sekarang dan kecenderungan yang akan terjadi pada masa yang akan datang memerlukan generasi muda dan peserta didik yang memiliki kompetensi, pengembangan kurikulum harus mampu mengantisipasi segala persoalan yang terjadi masa sekarang dan masa yang akan datang. Dalam membahas perubahan atau pengembangan kurikulum, tentu semua pihak sepakat bahwa kebijakan pengembangan kurikulum merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Dengan meningkatnya mutu pendidikan, maka akan meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

Pandemi Covid-19 yang dimulai dari awal tahun 2020 dan puncaknya di tahun 2021 telah menyebabkan kemunduran mutu pendidikan di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan mengambil sampel 3.391 siswa SD dari 7 Kabupaten/Kota di 4 (empat) provinsi, pada tahun 2021, menunjukkan kemajuan belajar selama periode Januari 2020 sampai April 2021 menurun secara signifikan. Kemunduran mutu pendidikan ini disebabkan oleh kehilangan pembelajaran (*Learning Loss*) di waktu pandemi covid-19. Sebelum pandemi, kemajuan belajar selama satu tahun (kelas 1 SD) adalah sebesar 129 poin untuk bidang literasi dan 78 poin untuk bidang numerasi. Setelah pandemi, kemajuan belajar selama kelas 1 berkurang secara signifikan dan menyebabkan *Learning Loss*. Untuk literasi, penurunan poin sebesar -52 poin atau setara dengan kehilangan kesempatan belajar selama 6 bulan. Untuk Numerasi, penurunan poin sebesar -44 poin atau setara dengan kehilangan kesempatan belajar selama 5 bulan. (Sumber: <https://www.republika.co.id/berita/r6q3xu483/pandemi-learning-loss-dan-kurikulum-prototipe>)

Pemerintah, melalui Kepmendikbudristek No. 56 Tahun 2022 melakukan upaya dalam rangka menurunkan *Learning Loss* dengan menerapkan Kurikulum baru, yang bernama Kurikulum Merdeka. Kebijakan Penerapan Kurikulum ini adalah sebagai upaya dalam rangka pemulihan pembelajaran setelah adanya pandemi Covid-19. Sejak Tahun Ajaran 2021/2022, Kurikulum Merdeka telah diimplementasikan di hampir 2500 sekolah yang mengikuti Program Sekolah Penggerak (PSP) dan 901 SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) sebagai bagian dari pembelajaran dengan paradigma baru. Kurikulum ini diterapkan mulai dari TK-B, SD & SDLB kelas I dan IV, SMP & SMPLB kelas VII, SMA & SMALB dan SMK kelas X. Dan

tahun ajaran selanjutnya, mulai tahun 2022/2023 satuan pendidikan dapat memilih untuk mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kesiapan masing-masing mulai TK-B kelas I, IV, VII, dan X. Pemerintah menyiapkan angket untuk membantu satuan pendidikan menilai tahap kesiapan dirinya untuk menggunakan Kurikulum Merdeka. Tiga pilihan yang dapat diputuskan satuan pendidikan tentang Implementasi Kurikulum Merdeka pada Tahun Ajaran 2022/2023 yaitu: (1) Menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan; (2) Menerapkan Kurikulum Merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan; atau (3) Menerapkan Kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar.

Usaha apapun melalui kebijakan yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan bila tidak ditindaklanjuti dengan pembinaan terhadap tenaga pendidik, maka tidak akan berdampak nyata pada peningkatan mutu pendidikan. Dalam hal implementasi Kurikulum Merdeka, satuan pendidikan yang menyelenggarakan kurikulum merdeka secara mandiri, diminta untuk mempelajarinya secara mandiri baik melalui modul-modul yang disediakan pemerintah, mengundang narasumber, maupun belajar secara online melalui aplikasi platform merdeka Mengajar (PMM). Namun demikian, evaluasi yang disampaikan oleh Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Riau pada akhir Agustus 2022 terhadap keaktifan guru dalam belajar secara mandiri, khususnya melalui platform merdeka mengajar (pmm), belum maksimal. Provinsi Riau dilaporkan sebagai provinsi yang guru-gurunya masih sangat sedikit memanfaatkan platform merdeka mengajar (pmm) untuk mempelajari kurikulum merdeka.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi, dan sebagainya sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam pencapaian sasaran (Rusdiana. 2015: 32).

Kebijakan adalah pesifikasi implisit atau eksplisit dari serangkaian tujuan tindakan yang diikuti atau harus diikuti terkait dengan pengenalan masalah atau masalah penting dan petunjuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kebijakan juga merupakan suatu keadaan atau pendirian yang dikembangkan untuk merespons masalah atau konflik dan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu (Harman dalam Fattah (2012:135).

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian konsep dan prinsip-prinsip baik secara implisit maupun eksplisit yang menjadi pedoman oleh pemerintah, organisasi, bahkan individu dalam melaksanakan suatu dalam pencapaian tujuan atau sasaran tertentu.

Sebuah kebijakan yang telah diputuskan memang tidak terlepas dari problematika. Hal ini membuktikan bahwa harapan tidak selalu sesuai dengan kenyataan, termasuk pada kebijakan tentang implementasi kurikulum merdeka. Dari sisi tenaga pendidik, ditemukan fakta bahwa sebagian besar guru belum memahami konsep tentang Capaian pembelajaran (CP), Tujuan Pembelajaran (TP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), dan Profil Pelajar Pancasila yang ada pada kurikulum merdeka. Agar menjadi profesional dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, tentunya tenaga pendidik atau guru harus sering dilatih melalui berbagai pelatihan-pelatihan baik secara daring maupun tatap muka. Tuntutan agar menjadi seorang yang profesional, bagi seorang guru memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Hal ini hendaknya mampu dimengerti oleh semua pihak, tidak hanya oleh masyarakat umum, tetapi juga pemerintah selaku pemangku kebijakan.

Menurut Edwards dalam Anggara (2014:250-252) studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mempengaruhi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Dalam kajian implementasi kebijakan, Edwards mulai dengan mengajukan dua buah pertanyaan, yaitu: prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil? Kedua, hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal? Menurut Edwards, terdapat empat faktor atau variable krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor atau variabel tersebut adalah *komunikasi*, *sumber daya*, *disposisi* atau sikap pelaksana dan *struktur birokrasi*. Keseluruhan variabel saling berhubungan dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi.

Problema klasik tentang rendahnya pemahaman guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka terlihat juga pada studi pendahuluan yang dilakukan penulis melalui wawancara dengan beberapa guru dan Kepala Sekolah di SD Negeri 028 Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu. Dari hasil wawancara dengan guru dan Kepala Sekolah SD Negeri 028 Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu yang dilakukan pada hari Jumat, 12 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB, di dapat beberapa kesimpulan. Pertama, guru belum mendapatkan pelatihan yang kompresif

mengenai kurikulum merdeka. Pemahaman mereka tentang kurikulum hanya didapatkan dari bertanya kepada guru-guru yang lebih memahami kurikulum merdeka. Dari guru-guru yang lebih memahami juga kadang-kadang memiliki persepsi pemahaman yang berbeda-beda tentang konsep kurikulum merdeka.

Kedua, pengawas sekolah yang seharusnya memberikan bimbingan dan arahan dalam implementasi kurikulum merdeka juga kurang memahami hakekat dan substansi kurikulum merdeka. Mereka tidak paham tentang bagaimana melaksanakan pembelajaran yang berbasis kurikulum merdeka di sekolah. Pengawas tidak memberikan arahan, contoh, bimbingan agar pelaksanaan proses pendidikan dilaksanakan berbasis Kurikulum Merdeka.

Ketiga, penggunaan aplikasi platform merdeka mengajar (pmm) belum dimanfaatkan secara maksimal oleh guru-guru. Dari 37 guru yang ada di sekolah SD Negeri 28 Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri, hanya 5 (lima) orang yang mau mengakses dan belajar kurikulum merdeka melalui aplikasi platform merdeka mengajar. Alasan mereka kurang aktif membuka aplikasi diantaranya adalah kesibukan mengajar dan mengurus rumah tangga sehingga tidak sempat membuka aplikasi. Selain itu, mereka juga beralasan belajar melalui aplikasi itu merepotkan bagi mereka.

Selanjutnya, hasil wawancara awal penulis dengan dengan Kepala Sekolah SD Negeri 028 Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu, penulis mendapatkan informasi bahwa kelemahan guru-guru di sekolahnya adalah mereka kurang begitu mahir dalam menggunakan teknologi informasi khususnya penggunaan laptop dan smartphone untuk belajar mandiri mengenai kurikulum merdeka. Selain itu, infrastruktur jaringan internet di SD Negeri 028 Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu juga masih belum memadai untuk pembelajaran daring.

Berdasarkan paparan di atas, ditemukan adanya permasalahan yang terkait dengan kebijakan implementasi kurikulum di SD Negeri 028 Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu, yaitu: (1) guru yang tidak kompeten atau masih rendahnya kompetensi guru dalam menerapkan kurikulum merdeka di sekolah; (2) pengawas sekolah yang belum memiliki pemahaman tentang kurikulum merdeka; dan (3) infrastruktur sekolah yang belum memadai untuk memberikan fasilitas belajar mandiri secara online kepada guru-guru di SD Negeri 028 Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu,.

Hasil temuan di atas bersifat sementara, namun memunculkan dugaan bahwa masih terdapat kesenjangan yang mencolok antara apa yang tertuang dalam kebijakan pemerintah mengenai Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dengan kondisi faktual di lapangan. Fenomena kesenjangan ini merupakan permasalahan yang mendasar yang masih perlu diperhatikan, dikaji, dan dicari pemecahannya.

Ada beberapa faktor yang semestinya menjadi perhatian pemerintah dalam hal implementasi suatu kebijakan, khususnya kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM). Faktor-faktor tersebut seperti: komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana atau disposisi, serta faktor birokrasi dan koordinasi antar pihak yang terlibat. Keempat faktor ini merupakan komponen utama di dalam keberhasilan implementasi kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) di Indonesia, khususnya di kota Pekanbaru. Dari keempat faktor ini kita bisa menilai apakah Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) berjalan sesuai dengan arah kebijakan atau tidak.

Fenomena dan gambaran seperti yang telah diuraikan di atas merupakan potret awal dari penelitian tentang implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka di SD Negeri 028 Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu. Penelitian ini difokuskan pada implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka di SD Negeri 028 Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu. Untuk mengetahui sejauh mana terlaksananya kebijakan yang telah dirumuskan dalam Kepmendikbudristek No.56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Merdeka, salah satunya dapat dilakukan dengan penelitian kebijakan. Penelitian kebijakan adalah penelitian dengan objek kebijakan tertentu.

Penelitian kebijakan menurut Nugroho (2013: 49) dikelompokkan menjadi dua jenis penelitian kebijakan, yaitu: (1) *Penelitian untuk Kebijakan*, dalam arti penelitian untuk merumuskan suatu kebijakan, baik sebagai suatu kebijakan baru ataupun kebijakan revisi; dan (2) *Penelitian tentang Kebijakan*, yaitu penelitian tentang suatu kebijakan tertentu dengan dimensi penelitian berkenaan dengan rumusan kebijakan, termasuk di dalamnya tentang perumusan dan dinamika di dalamnya dan bagaimana *implementasi suatu kebijakan*, juga termasuk bagaimana kebijakan dikendalikan, baik dari sisi monitoring, maupun penganganjarnya; kinerja kebijakan, termasuk dinamika di dalamnya, dari sejak *output (keluaran)* atau hasil yang dirasakan atau dinikmati organisasi publik, hingga *outcome (impak)* atau hasil yang dirasakan oleh publik dan umpan balik kepada organisasi publik, serta lingkungan kebijakan, baik pada saat perumusan, *implementasi*, maupun pada waktu kebijakan berkinerja.

Berdasarkan paparan di atas, maka jenis penelitian kebijakan yang dilakukan penulis adalah jenis penelitian tentang implementasi kebijakan yang mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka di SD Negeri 028 Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu berdasarkan Kepmendikbudristek No.56/M/2022.

Berdasarkan permasalahan yang penulis uraikan dalam latar belakang masalah, maka yang menjadi fokus penelitian adalah pemantauan keterlaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka di SD Negeri 028

Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu. Subjek penelitian dibatasi pada pelaku-pelaku baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di SD Negeri 028 Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu. Orang-orang tersebut diasumsikan sebagai sumber data atau sumber informasi di dalam penelitian ini. Penelitian ini fokus untuk memantau keterlaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka di SD Negeri 028 Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Implementasi Kurikulum Merdeka di SD Negeri 028 Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu.

Rumusan Permasalahan penelitian ini secara umum adalah: Bagaimanakah Implementasi Kurikulum Merdeka di SD Negeri 028 Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu? Berdasarkan rumusan permasalahan penelitian maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka di SD Negeri 028 Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu.

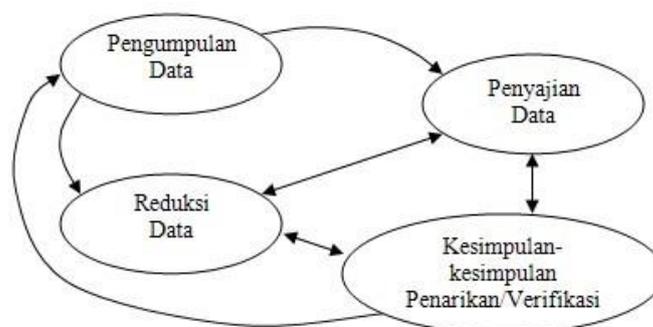
II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara menyeluruh (holistik) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus (spesifik) yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah (Moleong, 2014:6). Berdasarkan penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif sangatlah tepat digunakan untuk untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu ataupun kelompok mengenai kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka di SD Negeri 028 Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu. Tahapan-tahapan metode kualitatif dalam penelitian kebijakan ini menggunakan langkah-langkah yang diajukan oleh Danim (2000:187), yaitu: merumuskan masalah sebagai fokus penelitian kebijakan, mengumpulkan data lapangan, menganalisis data, merumuskan hasil studi serta menyusun rekomendasi untuk pembuat maupun pelaksana kebijakan.

Penentuan subyek penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive*. Karena penentuan informan dilakukan secara *purposive*, maka informan yang peneliti pilih dalam penelitian ini adalah pejabat atau aparat yang memiliki kewenangan pada kebijakan pendidikan dan pelaku atau implementor kebijakan, antara lain: Kepala SD Negeri 028 Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (kabid dikdas), Guru, dan Kepala Sekolah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh selama proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi kepada para informan terhadap implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka di SD Negeri 028 Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu. Sementara data sekunder peneliti dapatkan melalui studi dokumentasi yang terkait kebijakan Kurikulum Merdeka di SD Negeri 028 Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu, buku-buku, dan sumber internet yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data terdiri reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.



Sumber: Miles and Huberman (1992:20)

Utuk menguji keabsahan hasil penelitian maka dilakukan teknik pemeriksaan data berdasarkan empat kriteria: Derajat Kepercayaan (*Credibility*), Transferabilitas (*Transferability*), Kebergantungan (*Dependability*), dan Kepastian (*Confirmability*).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian dan deskripsi penelitian, hasil peneltia menunjukkan bahwa:

1. Proses Komunikasi Kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka di SD Negeri 028 Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu sudah dilakukan melalui sosialisasi dalam bentuk pelatihan, diklat, dan workshop. Namun volume atau porsi pelatihan harus lebih ditingkatkan. Kejelasan informasi tentang kebijakan Kurikulum Merdeka dalam Kepmendikbudristek No.56/M/2022 harus disampaikan ke sasaran yaitu kepada seluruh warga Sekolah SD Negeri 028 Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu. Sosialisasi Kepmendikbudristek No.56/M/2022 tentang

kurikulum Merdeka harus secara rutin dilaksanakan karena fakta menunjukkan masih rendahnya pemahaman guru dan warga SD Negeri 028 Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu tentang Kurikulum Merdeka;

2. Kesiapan Sumber daya dalam implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka di SD Negeri 028 Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu cukup memadai, baik dari segi jumlah staff adminstrasi maupun jumlah guru. Dari segi kualitas, profesionalisme guru perlu lebih ditingkatkan. Hal ini didasarkan kepada kenyataan di lapangan bahwa masih rendahnya pemahaman guru dan Kepala sekolah di SD Negeri 028 Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu tentang Kurikulum Merdeka. Ketersediaan informasi sebagai bagian dari aspek sumberdaya masih dirasakan kurang memadai sebagaimana diakui oleh Guru dan Kepala Sekolah SD Negeri 028 Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu. Aspek lain dari sumberdaya adalah adanya kewenangan. Kewenangan pelaksanaan Kurikulum Merdeka di SD Negeri 028 Pematang Reba baru sebatas kewenangan memilih Kurikulum Merdeka secara Mandiri Berubah. Selanjutnya dari aspek fasilitas, para pelaksana kebijakan belum memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, hal ini dibuktikan dengan masih minimnya buku-buku tentang Kurikulum Merdeka di sekolah;
3. Proses disposisi yang bermakna sikap, pemahaman, dan komitmen pelaksana terhadap implementasi kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka SD Negeri 028 Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu, khususnya pemahaman mengenai Capaian pembelajaran, Alur Tujuan Pembelajaran, Modul Ajar dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, perlu ditingkatkan lagi melalui pelatihan atau diklat bagi guru. Semua pihak memiliki respon yang positif yaitu memiliki komitmen dan mendukung implementasi kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka;
4. Struktur Birokrasi dalam Implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka di SD Negeri 028 Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu, sudah berjalan baik dalam hal koordinasi internal pelaksanaan kebijakan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembagian tugas, tanggung jawab dan kerjasama diantara sesama guru di SD Negeri 028 Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu. Namun untuk aspek Standar Operasional

Prosedur (SOP) pelaksana kebijakan, belum dibuat dan disosiliasikan.

IV. SIMPULAN

Dari paparan atau penyajian diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka di SD Negeri 028 Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu berdasarkan Kepmendikbudristek No.56/M/2022. Keempat faktor yang didasarkan Teori Charles Edwards III yaitu: (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya; (3) Disposisi; dan (4) Struktur Birokrasi. Keempat faktor ini bisa menggambarkan sejauhmana keberhasilan implementasi Kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka di SD Negeri 028 Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Danim, Sudarwan. 2000. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fattah, Nanang. 2012. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- <https://www.republika.co.id/berita/r6q3xu483/pandemi-learning-loss-dan-kurikulum-prototipe> , diakses tanggal 6 September 2022, Pukul 21.30 WIB.
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, & Pendidikan Tinggi Nomor 56/M/2022 tentang Kurikulum Merdeka.
- Moleong, Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Miles, MB, dan Huberman A,M.1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 2009. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nugroho, Riant. 2013. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Rusdiana, H.A. 2015. *Kebijakan Pendidikan; Dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia